

RESEARCH ARTICLE

Penerapan Hukum Multidisipliner dalam Penegakan Hukum di Tengah Degradasi Demokrasi

Normalisa Ilham Luviana✉

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ normalisailham@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This study examines how democratic degradation affects the rule of law, highlighting the importance of using an interdisciplinary approach to strengthen legal systems in today's global environment. Many countries are concerned with democratic degradation, which includes the decline of democratic institutions, increased corruption, restrictions on civil liberties and decreased judicial independence. Research conducted in Poland, Hungary, Brazil, Turkey and the Philippines shows how basic democratic principles can be threatened by excessive executive power and anti-democratic rhetoric. This research offers insights into the application of a holistic legal approach to tackle abuse of power and protect democracy from deterioration by integrating the perspectives of sociology, psychology, political science and economics. The findings of this study suggest that a multidisciplinary approach can improve the fairness and appropriateness of law enforcement, strengthen the integrity of legal institutions, and provide more effective solutions to protect and strengthen democracy.

Keywords: Democracy Degradation, Law Enforcement, Multidisciplinary Approach.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji bagaimana degradasi demokrasi mempengaruhi supremasi hukum, dengan menyoroti betapa pentingnya menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memperkuat sistem hukum di lingkungan global saat ini. Banyak negara prihatin dengan degradasi demokrasi, yang meliputi kemunduran lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan korupsi, pembatasan kebebasan sipil dan penurunan independensi peradilan. Penelitian yang dilakukan di Polandia, Hungaria, Brasil, Turki dan Filipina menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar demokrasi dapat terancam oleh kekuasaan eksekutif yang berlebihan dan retorika anti-demokrasi. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang penerapan pendekatan hukum yang holistik untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi demokrasi dari kemerosotan dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ekonomi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner dapat meningkatkan keadilan dan kesesuaian penegakan hukum, memperkuat integritas institusi hukum, dan memberikan solusi yang lebih efektif untuk melindungi dan memperkuat demokrasi.

Kata Kunci: Degradasi Demokrasi, Penegakan Hukum, Pendekatan Multidisipliner.

PENDAHULUAN

International IDEA, suatu entitas internasional yang memberikan dukungan kepada demokrasi yang berkelanjutan pada skala global, menafsirkan demokrasi sebagai “pengendalian warga terhadap perumus kebijakan dan kesetaraan politik bagi pihak-pihak yang melaksanakan pengendalian tersebut.” Secara lebih rinci, demokrasi ideal “berusaha menjamin kesetaraan dan kebebasan dasar; memberdayakan mayoritas rakyat; menyelesaikan konflik melalui dialog damai dengan menghormati perbedaan; serta menciptakan perubahan politik dan sosial tanpa adanya konflik” (Landman 2008: 17).

Antara tahun 1975 dan 2007, jumlah negara yang menerapkan demokrasi secara global mengalami peningkatan atau stabil selama tiga dekade terakhir. Belum pernah sejarah dunia menyaksikan perkembangan demokrasi dalam jangka panjang semacam ini. Walaupun beberapa dari “demokrasi” yang baru ini tidak sepenuhnya liberal—dalam beberapa kondisi sehingga Steven Levitsky dan Lucan Way mengklasifikasikannya sebagai rezim “otoriter yang kompetitif”—tren positif selama tiga dekade terakhir telah disertai dengan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kebebasan. Tingkat kebebasan global pada tahun 1974 rata-rata adalah 4,38 (pada skala tujuh poin, di mana 1 adalah yang paling bebas dan 7 adalah yang paling represif). Selama tahun 1970-an dan 1980-an, angka ini meningkat secara perlahan, tetapi tidak mencapai di atas titik tengah 4,0 hingga runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1990. Tingkat kebebasan rata-rata global meningkat dalam 25 dari 32 tahun dari 1974 hingga 2005, mencapai puncaknya di angka 3,22 pada tahun 2005. Namun, kebebasan dan demokrasi global tumbuh lambat sekitar tahun 2006. Sejak tahun 2006, tidak ada peningkatan bersih dalam jumlah negara demokrasi elektoral, yang jumlahnya berkisar antara 114 dan 119 (sekitar 60 persen negara di dunia). Jumlah negara demokrasi elektoral dan liberal mulai menurun setelah tahun 2006 dan kemudian mendatar. Sejak tahun 2006, rata-rata tingkat kebebasan di dunia juga sedikit menurun, sekitar 3,30.

Degradasi demokrasi telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi banyak negara di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Degradasi ini sering ditandai dengan penurunan kualitas demokrasi yang mencakup pelemahan institusi demokratis, peningkatan korupsi, pengurangan kebebasan sipil, dan penurunan independensi yudisial. Negara-negara seperti Polandia, Hungaria, dan Filipina telah menunjukkan bagaimana kekuasaan eksekutif yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan merusak dasar-dasar demokrasi. Retorika anti-demokrasi, serta tindakan represif terhadap media dan oposisi politik di Brasil dan Turki merupakan ancaman terhadap kebebasan dan hak asasi manusia. Penegakan hukum adalah sektor yang paling terpengaruh dalam hal ini. Seringkali, sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak sipil dan menegak keadilan berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan tirani dan menekan oposisi politik. Seperti yang terjadi di banyak negara, pengurangan independensi yudisial karena intervensi eksekutif mengakibatkan pengadilan kehilangan kemampuan untuk berfungsi sebagai pengawasan yang adil terhadap tindakan pemerintah. Meluasnya korupsi di kalangan pejabat publik memperparah keadaan ini. Selain itu, proses peradilan menjadi tidak stabil dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, dan pihak yang berkuasa menggunakan undang-undang untuk membatasi kebebasan berekspresi, melarang demonstrasi publik, dan menghukum mereka yang menentang pemerintah.

Dalam situasi yang kompleks ini, pendekatan tradisional dalam penegakan hukum yang sering kali hanya berfokus pada aspek legal formal tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang timbul dari degradasi demokrasi. Pendekatan hukum yang lebih holistik dan multidisipliner diperlukan, dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam analisis hukum dan penegakan hukum, seperti sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan hukum multidisipliner ini tidak hanya membantu memahami dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi degradasi demokrasi tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum dapat diperkuat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, analisis sosiologis dapat mempengaruhi bagaimana perilaku peradilan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan hubungan sosial., sementara psikologi dapat membantu memahami motivasi individu untuk melakukan korupsi dan mengembangkan metode pencegahan yang lebih baik. Ilmu politik, di sisi lain, dapat memberikan pandangan tentang bagaimana kebijakan publik dapat diubah untuk memperkuat institusi demokratis dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Pendekatan hukum multidisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ekonomi menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan degradasi demokrasi yang melanda berbagai negara. Studi kasus dari Polandia dan Hungaria menunjukkan bagaimana intervensi eksekutif yang berlebihan dapat mengancam independensi yudisial dan kebebasan media, sementara di Brasil dan Turki, analisis psikologis telah mengungkapkan faktor-faktor individu yang mendorong tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan politik. Evaluasi kebijakan publik di Filipina, yang membatasi kebebasan berekspresi untuk menekan oposisi politik, juga menyoroti pentingnya perspektif hukum yang holistik untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga integritas demokrasi. Dengan mengintegrasikan perspektif-perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi antisipatif yang berbasis hukum multidisipliner, yang tidak hanya memahami dinamika sosial dan politik yang kompleks, tetapi juga mengidentifikasi solusi yang efektif dalam memperkuat penegakan hukum dan melindungi demokrasi dari ancaman degradasi yang terus meningkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan publik yang ada terkait penegakan hukum dan degradasi demokrasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan studi kasus dari negara-negara yang mengalami degradasi demokrasi. Teknik analisis meliputi evaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan berbagai kriteria. Selain itu, pendekatan multidisipliner diterapkan untuk mengidentifikasi strategi antisipatif yang dapat memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Degradasi Demokrasi dan Dampaknya pada Penegakan Hukum

Degradasi demokrasi adalah proses di mana negara-negara yang awalnya memiliki struktur dan praktik demokratis mulai mengalami penurunan dalam kualitas demokrasi mereka dan telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di banyak negara. Salah satu dampak paling signifikan dari degradasi demokrasi ini adalah melemahnya efektivitas dan integritas penegakan hukum. Dua contoh yang menonjol adalah Polandia dan Hungaria, di mana reformasi politik telah mengakibatkan peningkatan kontrol pemerintah terhadap lembaga yudisial, dengan implikasi signifikan terhadap keadilan dan kebebasan hukum.

Amandemen konstitusional dan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Polandia telah memperkuat kontrol eksekutif atas sistem peradilan. Pemerintah Hukum dan Keadilan (PiS), yang mulai berkuasa pada tahun 2015, memperkenalkan reformasi yang merupakan salah satu perubahan terpenting. Mereka menerapkan undang-undang yang memperkenalkan perubahan besar dalam struktur dan operasi Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehakiman Nasional, badan yang bertanggung jawab atas pengangkatan hakim.¹ Sebagai hasil dari reformasi ini, eksekutif dan legislatif telah mendapatkan kekuasaan yang lebih besar atas seleksi dan pengawasan hakim, yang telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap independensi peradilan. Pengaruh politik memiliki dampak yang lebih besar terhadap Mahkamah Konstitusi Polandia, yang seharusnya menjadi badan independen yang mengontrol konstitusionalitas undang-undang. Sebagai contoh, pemerintah PiS telah mengubah prosedur pengangkatan dan seleksi hakim, dan memperkenalkan ketentuan yang memungkinkannya untuk menjatuhkan sanksi disiplin yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih ketat. Laporan dari Freedom House mengindikasikan bahwa langkah-langkah ini telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam skor demokrasi Polandia, yang mencerminkan penurunan kebebasan politik dan proses demokrasi.² Freedom House mencatat bahwa Polandia mengalami penurunan dalam kebebasan yudisial dan kebebasan media, yang keduanya penting untuk demokrasi yang sehat. Pada tahun 2020, Freedom House menurunkan status Polandia dari "demokrasi mapan" menjadi "demokrasi dalam transisi" atau "*hybrid*". Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pemerintah Polandia semakin mengikis fondasi demokrasi dengan memperlemah institusi yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Hungaria di bawah pemerintahan Viktor Orbán sejak 2010 telah menunjukkan pola yang serupa, dengan perubahan konstitusional dan legislatif yang meningkatkan pengaruh politik atas peradilan dan media. Orbán dan partainya, Fidesz, telah memperkenalkan perubahan yang meningkatkan kontrol pemerintah atas lembaga-lembaga negara dan melemahkan independensi lembaga-lembaga tersebut. Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah Orbán adalah amandemen konstitusi pada tahun 2011 yang

¹ Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown Publishing Group.

² Freedom House. (2023). *Freedom in the World 2023: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties*. Freedom House.

memperluas kekuasaan eksekutif untuk menunjuk hakim dan mengawasi sistem peradilan. Pemerintah juga membentuk Dewan Yudisial Nasional baru yang mendominasi proses pengangkatan dan promosi hakim. Amandemen ini memudahkan pemerintah untuk mengisi posisi kunci dengan sekutu politik dan meningkatkan pengaruhnya terhadap keputusan yudisial. Human Rights Watch melaporkan bahwa tindakan pemerintah Hungaria telah melemahkan lembaga-lembaga independen dan mengikis hak-hak sipil serta kebebasan berekspresi.³ Sebagai contoh, media independen dan organisasi non-pemerintah telah menghadapi tekanan yang meningkat, termasuk undang-undang yang membatasi operasional mereka dan kampanye yang mendiskreditkan mereka. Dampaknya terhadap sistem hukum sangat serius; ada penurunan kepercayaan publik terhadap keadilan yudisial, karena masyarakat merasakan adanya ketidakadilan yang meningkat dan pengaruh politik yang tidak semestinya terhadap keputusan hukum.

Kebijakan antikorupsi yang diimplementasikan di negara-negara dengan degradasi demokrasi seringkali menunjukkan hasil yang beragam. Transparency International's Corruption Perceptions Index 2023 mengungkapkan bahwa korupsi tetap menjadi masalah besar di Filipina, meskipun ada upaya reformasi yang berlangsung lama. Di Filipina, sistem hukum seringkali digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah saat ini, yang memperburuk korupsi sistemik di seluruh level pemerintahan.⁴ Di bawah Presiden Rodrigo Duterte, penggunaan hukum untuk menekan lawan-lawan politik menjadi lebih nyata, menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk tujuan politik. Meskipun Filipina memiliki banyak badan anti-korupsi, seperti Komisi Audit dan Kantor Ombudsman, tekanan politik dan kurangnya sumber daya seringkali menghalangi mereka untuk bekerja secara efektif. Selain itu, masalah-masalah dalam pelaksanaan reformasi yang nyata di lapangan muncul karena kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti Undang-Undang Kebebasan Memeroleh Informasi Publik, sering tidak dilaksanakan atau diabaikan.

Sebaliknya, reformasi yang dilakukan di Rumania di bawah tekanan Uni Eropa menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat membantu memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan efisiensi sistem hukum. Sebagai anggota Uni Eropa, Rumania berada di bawah tekanan besar untuk mematuhi standar hukum dan demokrasi yang ketat, yang telah mendorong reformasi yang signifikan dalam sistem yudisialnya. Badan Anti Korupsi Nasional (DNA) Rumania telah menjadi simbol dari upaya negara ini dalam memerangi korupsi tingkat tinggi, meskipun menghadapi tantangan dari elite politik yang berpengaruh.⁵ DNA berhasil mengajukan tuntutan terhadap beberapa tokoh politik berpengaruh, termasuk mantan perdana menteri, yang menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum terhadap korupsi. Selain itu, reformasi yang didorong oleh Uni Eropa telah berkontribusi pada implementasi kebijakan yang memperkuat pengawasan publik dan memastikan bahwa prosedur hukum transparan dan adil.

Perbandingan ini menunjukkan bagaimana keberhasilan kebijakan anti-korupsi dapat dipengaruhi oleh konteks politik dan keterlibatan internasional. Terlepas dari upaya

³ Human Rights Watch. (2023). *World Report 2023: Hungary*. Human Rights Watch.

⁴ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Available at: Transparency International.

⁵ Human Rights Watch. (2019). *Romania: Anti-Corruption Efforts Under Threat*. Available at: Human Rights Watch Report.

reformasi di Filipina, korupsi yang sudah mengakar dan penggunaan sistem hukum sebagai alat politik masih menjadi hambatan utama. Sebaliknya, di Rumania, tekanan dari Uni Eropa telah mendorong reformasi yang positif, memperkuat independensi yudisial, dan meningkatkan transparansi, yang secara signifikan membantu dalam melawan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang mengalami kemerosotan demokrasi, penerapan kebijakan anti-korupsi yang efektif membutuhkan dukungan politik yang signifikan dan pengawasan internasional.

3.2 Integrasi Pendekatan Multidisipliner dalam Penegakan Hukum di Tengah Degradasi Demokrasi

Degradasi demokrasi berdampak langsung pada cara hukum ditegakkan, terutama ketika sistem hukum menjadi alat bagi kepentingan politik dan bukan lagi sebagai penegak keadilan yang tidak memihak. Mengadopsi pendekatan multidisipliner dalam penegakan hukum dalam menghadapi tantangan ini sangatlah penting. Pendekatan ini membutuhkan studi dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, dan psikologi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek dampak kebijakan publik dan penegakan hukum terhadap masyarakat.

Situasi di Polandia setelah reformasi politik yang memperkuat kontrol negara atas pengadilan adalah contoh kasus dari sudut pandang sosiologis. Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa ketika kebijakan pemerintah memperkuat kekuasaan negara dan membatasi kebebasan sipil, struktur sosial masyarakat berubah secara signifikan. Di Polandia, warga negara memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap sistem hukum karena perubahan konstitusional yang membuat eksekutif lebih mudah mengendalikan yudikatif. Sebagai contoh, pemangkasan independensi yudisial menyebabkan masyarakat Polandia merasa sistem peradilan lebih berpihak kepada pemerintah daripada kepada rakyat. Hal ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan ketidakpuasan sosial, yang pada akhirnya dapat mengguncang stabilitas sosial dan politik negara. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap hukum rentan terhadap konflik dan ketidakstabilan sosial, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk menjaga keteraturan dan keamanan.

Dari perspektif psikologis, dampak degradasi demokrasi terhadap perilaku individu dan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum juga sangat signifikan. Di Filipina, di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, peningkatan penggunaan hukum untuk menekan lawan politik dan jurnalis telah menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpastian hukum yang mendalam.⁶ Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada jurnalis dan politisi, tapi juga pada masyarakat umum yang percaya bahwa sistem peradilan tidak berjalan dengan baik. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa terancam oleh ketidakpastian hukum dan kekuasaan politik yang represif, mereka cenderung bersikap pasif atau bahkan menentang otoritas hukum. Ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya harus adil secara substansi, tetapi juga harus dirasakan adil oleh masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik dan menjaga kepercayaan publik.

⁶ Amnesty International. (2021). *Philippines 2020: Human Rights under Siege*. Available at: Amnesty International Report.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum juga memainkan peran penting dalam konteks penegakan hukum di tengah degradasi demokrasi. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seperti yang terlihat di berbagai belahan dunia, kebijakan ekonomi yang gagal menciptakan kesetaraan seringkali menjadi sumber ketidakpuasan yang mendalam dan dapat mendorong praktik-praktik korupsi lebih lanjut.⁷ Misalnya, di banyak negara berkembang, ketidakadilan ekonomi membuat orang melihat korupsi sebagai cara untuk bertahan hidup atau memperbaiki situasi keuangan mereka, terutama dalam konteks peluang ekonomi dan mobilitas sosial yang terbatas. Kebijakan hukum yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor ekonomi dan menciptakan peluang kesetaraan, dapat membantu mengurangi insentif untuk korupsi dan mempromosikan keadilan yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial melalui kebijakan hukum yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan menciptakan peluang untuk kesetaraan.

Melalui integrasi perspektif multidisipliner ini, kita dapat memahami bahwa penegakan hukum yang efektif di tengah degradasi demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar reformasi hukum. Pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan ekonomi dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan publik dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Di banyak negara, supremasi hukum telah mengalami kemerosotan akibat degradasi demokrasi, yang ditandai dengan melemahnya struktur demokrasi, meningkatnya korupsi, pembatasan kebebasan sipil, dan berkurangnya independensi yudisial. Contoh dari Polandia, Hungaria, Brasil, Turki dan Filipina menunjukkan bagaimana campur tangan politik dan penggunaan hukum menghancurkan sistem hukum dan merusak kepercayaan publik. Namun, Uni Eropa mendukung reformasi Rumania, yang menunjukkan bahwa supremasi hukum yang efektif masih dapat dicapai melalui kebijakan yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas.

Memahami dan mengatasi konsekuensi dari kemerosotan demokrasi membutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sosiologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik. Dengan cara ini, sistem hukum yang lebih efektif dan adil dapat diciptakan, demokrasi dapat diperkuat dan kepercayaan publik dapat dibangun. Pendekatan ini menekankan perlunya komitmen untuk menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip demokrasi melalui pendekatan holistik. Dukungan asing dan keterlibatan masyarakat sipil juga penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mengawasi reformasi. Tantangan-tantangan kompleks dari kemerosotan demokrasi ini dapat diatasi melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan dukungan politik yang kuat.

⁷ Rose-Ackerman, S. (2017). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.

DAFTAR PUSTAKA

- Freedom House. (2023). Freedom in the World 2023: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. Freedom House Report.
- Rose-Ackerman, S. (2017). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316797981>
- Amnesty International. (2021). Philippines 2020: Human Rights under Siege. Available at: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa35/3825/2021/en/>
- Human Rights Watch. (2019). Romania: Anti-Corruption Efforts Under Threat. Human Rights Watch Report. Available at: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/romania>
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Available at: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Human Rights Watch. (2023). World Report 2023: Hungary. Human Rights Watch.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown Publishing Group.
- European Commission. (2020). Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism. European Commission Report. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2327
- Pech, L., & Scheppele, K. L. (2017). Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU. Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 19, 3-47. <https://doi.org/10.1017/cel.2017.9>
- Skapska, G. (2020). Poland's Political System and the Constitutional Court: The Dynamic of Degradation of Democratic Values. International Journal of Constitutional Law, 18(1), 173-193. <https://doi.org/10.1093/icon/moaa021>
- Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. Journal of Democracy, 26(1)